

Judul : Saran pimpinan komisi VII DPR, kebijakan bebas visa harus mampu gerakkan ekonomi
Tanggal : Senin, 29 Juni 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Saran Pimpinan Komisi VII DPR

Kebijakan Bebas Visa Harus Mampu Gerakkan Ekonomi

Kebijakan bebas visa harus mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan menggerakkan banyak sektor perekonomian.

HAL itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti polemik antara Kementerian Pariwisata dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasaran, terkait usulan penambahan negara bebas visa kunjungan dalam rangka mendukung pariwisata Tanah Air.

"Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) merupakan salah satu instrumen penting untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tengah persaingan global yang semakin kompetitif," kata Evita Nursanty, Jumat (26/6/2026).

Adapun usul penambahan negara bebas visa disampaikan oleh Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, beberapa waktu lalu.

Menpar mengusulkan kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) dengan formula 8+1 untuk negara dan wilayah teritori potensial yang meliputi Asia Timur & Selatan

(Jepang, Korea Selatan, dan India), Oceania (Australia dan Selandia Baru), Eropa Timur & Asia Tengah (Belarusia dan Kazakhstan).

Kemudian juga negara teritori khusus yakni Makau, dengan skema fasilitas perluasan (+1) bagi pemegang status *permanent resident* (izin tinggal tetap) Singapura.

Usulan tersebut pun mendapat tanggapan dari Direktur Jendral (Dirjen) Imigrasi, Hendarsam Marantoko yang meminta agar wacana penambahan negara bebas visa kunjungan dikaji ulang demi mencegah masuknya wisatawan yang tidak berkualitas. Dirjen Imigrasi juga menyebut kebijakan yang sama sudah pernah dilakukan pada 2015 hingga 2024 untuk 165 negara, namun tidak berdampak signifikan pada penambahan devisa kepada negara.

Terkait hal tersebut, Evita menilai kebijakan ini tidak seharusnya dipahami sebagai pertentangan antara kepentingan ekonomi dan keamanan, melainkan sebagai



Evita Nursanty

upaya menghadirkan keseimbangan antara kedua sektor itu.

"Saya menghormati pandangan Direktorat Jenderal Imigrasi yang mengingatkan agar kebijakan bebas visa dikaji secara hati-hati. Namun, evaluasi kebijakan ini tidak boleh hanya didasarkan pada hilangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari biaya visa atau pengalaman kebijakan tahun 2016," ungkapnya.

Menurut Evita, seharusnya isu bebas visa kunjungan dilihat dari kaca mata manfaat ekonomi secara menyeluruh.

"Memang benar, apabila suatu negara diberikan fasilitas bebas visa, negara kehilangan potensi

PNBP dari pembayaran visa," ungkap Evita.

Namun di sisi lain, apabila kebijakan tersebut mampu meningkatkan kunjungan wisatawan berkualitas, maka perputaran ekonomi yang dihasilkan dapat jauh lebih besar daripada PNBP yang hilang," sambungnya.

Evita mengatakan kebijakan perluasan BVK dapat menjadi katalis untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara yang memiliki banyak manfaat. Ia merinci berbagai manfaat perekonomian dari peningkatan kunjungan wisatawan berkualitas yang dapat didorong dengan pendekatan BVK.

"Belanja wisatawan akan menggerakkan sektor perhotelan, restoran, transportasi, maskapai penerbangan, destinasi wisata, UMKM, ekonomi kreatif, pusat perbelanjaan, hingga meningkatkan penerimaan pajak dan membuka lapangan kerja," jelas Evita.

Evita pun menyebut, ukuran keberhasilan kebijakan bebas visa seharusnya dihitung berdasarkan manfaat ekonomi bersih (*net economic benefit*), bukan hanya dari

penerimaan visa.

"Saya juga menegaskan bahwa kebijakan bebas visa kunjungan harus tetap berlandaskan prinsip *selective policy*, asas resiprositas (*reciprocal principle*), asas manfaat, serta mempertimbangkan aspek keamanan nasional," tegas politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu.

Evita juga mengatakan, negara yang memperoleh kemudahan masuk ke Indonesia seyogianya juga memberikan kemudahan yang sama bagi Warga Negara Indonesia.

"Di kawasan regional, negara-negara seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Vietnam telah menjadikan kemudahan akses masuk sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan daya saing pariwisata, menarik investasi, dan memperkuat perekonomian nasional," papar Evita.

Pimpinan Komisi yang membicarakannya soal Pariwisata DPR ini pun memandang Indonesia tidak boleh tertinggal dalam kompetisi tersebut. Evita menyatakan, perluasan kebijakan BVK harus dilihat sebagai bagian dari strategi memperkuat daya saing ekonomi. ■ PYB